

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Adon, Nasrullah, Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia. 2015.
- Aprillia, Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Asep, Muslim, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Perca. 2007.
- Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Bahder, Johan, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum Cetakan Kedua*. Bandung: CV, Mandar Maju. 2016.
- Dasril, Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. Kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Didik G. Suharto. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Herman, Abdullah. *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta: Rmbooks. 2009.
- Jimly, Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, cetakan kedua*. Jakarta : Konstitusi Press. 2005
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.
- Moch, Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara. 2012
- Ni'matul, Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press. 2015.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Siagian, Sondang, P. *Filasfat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2016.

Sudjatmiko, Budiman., & Zakaria, Yando. *Desa Hebat Indonesia Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2014.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Diseluruh Wilayah Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3153.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

_____, Peraturan Pemerintah Tentang Desa. Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.
- _____, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Nomor 4 Tahun 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

C. Jurnal

- Alkadafi, M. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 2015.
- Meirina. Fajarwati. *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, No.1. 2018.

Pakaya, Jefri, S. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Legislatif Indonesia. Vol, 13, No, 01. 2016.

D. Artikel Internet

Assegaf, S.D.I. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017.
<http://digilib.unhas.ac.id> (diakses tanggal 01 Februari 2021 pukul 11.30 WIB).